

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Kegiatan pasca bencana merupakan hal yang dilakukan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi dampak-dampak setelah banjir. Kerugian yang ditimbulkan dari banjir dapat berupa materil ataupun non-materil. Banjir merupakan bencana alam merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan dan bisa terjadi dengan tiba-tiba. Bencana alam dapat terjadi dikarenakan perubahan alam yang begitu cepat mulai dari iklim, keadaan, perubahan cuaca. Hal ini dapat berpengaruh dan berdampak pada masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian akibat terjadinya bencana. Dampak yang dapat ditimbulkan dapat berupa: terganggunya aktivitas dalam ekonomi, sosial dan budaya, kerusakan lingkungan dan bangunan, gangguan kesehatan, terhambatnya fungsi pemerintahan dan terdampaknya psikologis masyarakat akibat banjir.

Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal menanggulangi bencana, BNPB pun dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana. Pembentukan BNPB merupakan realisasi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pemerintah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung untuk memperbaiki dan memulihkan aspek-aspek pada pelayanan publik

setelah banjir. Kabupaten Bandung merupakan kawasan dengan topografi wilayah Kabupaten Bandung merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 500m–1.800m di atas permukaan laut, dengan wilayah terendah Kecamatan Baleendah, Bojongsoang dan Dayeuhkolot. Keadaan kabupaten yang rentan terhadap bencana dapat berdampak kepada masyarakat. pemerintah daerah Kabupaten Bandung membentuk Badan Penanggulangan bencana Daerah dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010.

Banjir adalah peningkatan debit air yang melebihi sengai sehingga berimbas kepada jalan raya ataupun pemukiman. Banjir dapat mempengaruhi kegiatan dan dapat mengganggu berlangsungnya aktivitas manusia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendefinisikan banjir sebagai peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.

Daerah yang paling terdampak ketika air dari sungai meluap adalah daerah cekungan dan daerah paling rendah dan berada dekat sekitar sungai. Desa Dayeuhkolot terdapat di dataran yang rendah di Kabupaten Bandung. Desa Dayeuhkolot merupakan bagian dari Kecamatan Dayeuhkolot merupakan daerah cekungan yang terdapat di Kabupaten Bandung.

Bencana Banjir masih saja terjadi di Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dan menjadi hal yang sangat rentan terjadi di musim penghujan. Sampah merupakan hal yang sangat jelas bila bencana banjir

terjadi. Penumpukan sampah yang terlihat di jembatan, hal tersebut akan menyebabkan penyumbatan saluran air.

Dalam penerapan kebijakan pasca bencana masih terdapat masalah-masalah dalam pelaksanaannya. Masih terdapat dampak pada bencana yang belum terselesaikan. Berikut peneliti paparkan masalah-masalah yang ditemukan:

1. Komunikasi antar pihak terkait dalam implementasi kebijakan pasca bencana.

Masih terdapat dampak banjir yang terlihat dalam pascabencana. Berdasarkan observasi peneliti masih ada dampak banjir di sebagian Desa Dayeuhkolot yang belum terselesaikan. Masih ada bangunan yang tenggelam oleh lumpur pasca banjir. Kurangnya komunikasi antar pihak terkait dalam mengatasi pasca bencana banjir. Komunikasi merupakan proses pengiriman informasi dari seseorang dan penerimaan informasi oleh lain melalui saluran tertentu (Silalahi (2002) dikutip Ine Mariane dalam buku Azas-Azas Manajemen)



Gambar 1

Potret rumah yang terdampak banjir



Gambar 2 Genangan air dan lumpur

Menguatkan konteks diatas, peneliti menemukan jurnal yang berjudul “Implementasi Kebijakan dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Dayeuhkolot” dijelaskan bahwa Pada aspek rehabilitasi dan rekontruksi bencana banjir terlihat belum berjalan maksimal buktinya seperti koordinasi yang dijalankan antara pemerintah dan masyarakat belum berjalan dengan baik dan optimal guna menentukan titik rawan bencana, masih banyak bangunan-bangunan yang lama belum dilakukan penerapan seperti tanggul dan gorong-gorong, pelaksanaan rekostruksi dan rehabilitasi belum merata.

Kemudian jurnal yang berjudul “Koordinasi Oleh BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung” menjelaskan bahwa peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) BPBD sebagai koordinator belum berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi komando yang dimiliki BPBD belum berjalan dengan optimal, ini terlihat tidak adanya ketegasan dari koordinator dalam mengarahkan kegiatan dalam penanggulangan bencana.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang penanggulangan bencana, pasca banjir termasuk dalam rehabilitasi (pemulihan) rekonstruksi (pembangunan kembali).

2. Aspek sumber-sumber kebijakan dan lingkungan: sosial, ekonomi, politik.

Kurang meratanya bantuan pada saat pasca bencana banjir menyebabkan kecemburuan sosial antar-warga, padahal dalam pasca bencana banjir warga sangat terdampak karena dampak-dampak setelah banjir yang memerlukan waktu untuk memulihkannya kembali. Oleh karena itu, aktivitas sosial, ekonomi, budaya

sangatlah terganggu. Sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Banjir tentang pemulihan aspek sosial, ekonomi dan budaya serta tentang pemenuhan kebutuhan dan bantuan.

Bantuan kepada masyarakat yang tidak merata dan hanya sebagian masyarakat yang mendapat bantuan menimbulkan kecurigaan dalam distribusi bantuan. Hal ini didapatkan berdasarkan observasi peneliti. Dalam memperkuat konteks tersebut terdapat penelitian terdahulu dari jurnal yang berjudul “Modal Sosial Dalam Penanggulangan Bencana Banjir (Kasus di Kabupaten Bandung, Jawa Barat)” dijelaskan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah sebelum bencana banjir cukup baik, namun setelah terjadi banjir secara berulang, kepercayaan terhadap pemerintah cenderung turun. Hal ini disebabkan kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah yang dipandang memanipulasi bantuan dan keterlambatan bantuan.

Kemudian jurnal yang berjudul “Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah (Studi Kasus Bencana Banjir di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung)” menjelaskan bahwa saat terjadinya bencana banjir di Kecamatan Rancaekek tidak semua daerah yang berada di Kecamatan Rancaekek mendapatkan bantuan perhatian dari Penanggulangan Bencana Daerah dan instansi yang membantu penanggulangan bencana banjir.



Gambar 3 Banjir di Desa Dayeuhkolot
Sumber : Desa Dayeuhkolot

Desa Dayeuhkolot merupakan desa yang paling terdampak dikarenakan letak desa sangat dekat dengan aliran sungai Citarum dan ketinggian air ketika banjir yang dapat mencapai atap rumah. Banjir pun dapat mengganggu kegiatan administrasi di pemerintahan desa. Hal ini tentu saja akan meninggalkan dampak yang cukup serius ketika banjir mulai reda.

Masih terdapat dampak bencana yang belum terselesaikan dalam rangka pemulihan dan pembangunan pasca bencana. Badan penanggulangan bencana daerah adalah lembaga yang bentuk untuk penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan UU no 24/2007 yang mendefinisikan : “serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana , kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.”

Perhitungan indeks ancaman diperoleh dengan melakukan pengklasifikasian data frekuensi dan intensitas setiap bencana yang terjadi ke dalam 3 (tiga) kelas indeks, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan Kepala BNPB No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian.

Permasalahan yang tersorot dalam pasca bencana banjir Desa Dayeuhkolot. Dampak dari bencana banjir menyebabkan dampak pada budaya yang merupakan perubahan lingkungan, sistem nilai, etika, dan norma dalam masyarakat setelah bencana. Berubahnya standar nilai dalam masyarakat memperlihatkan dampak buruk pada masalah bencana. Dampak lingkungan pun terjadi seperti menurunnya kualitas lingkungan.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik mengambil judul penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pasca Bencana Banjir badan Penanggulangan bencana Daerah di Desa Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Adapun fokus pada penelitian ini ialah di Desa Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model implementasi kebijakan pasca

bencana banjir dan aspek apa saja yang terhambat dalam proses implementasi kebijakan pasca bencana banjir di Desa Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan data dari hasil penjajagan di lapangan penulis memfokuskan penelitian pada proses implementasi kebijakan pasca bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Desa Dayeuhkolot dengan indikator implementasi kebijakan mengingat tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam bidang rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Solichin Abdul Wahab (2020: 165) Model Proses Implementasi Kebijakan memuat 6 dimensi yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan : ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana, dan lingkungan ekonomi sosial politik.

Maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada proses implementasi kebijakan pasca bencana banjir Desa Dayeuhkolot Kabupaten Bandung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses implementasi kebijakan bencana pasca bencana banjir di Desa Dayeuhkolot Kabupaten Bandung?

2. Aspek apa saja yang mendapat hambatan dalam proses implementasi kebijakan pasca bencana banjir di Desa Dayeuhkolot Kabupaten Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada masalah kemudian dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai proses implementasi kebijakan banjir di Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses implementasi kebijakan pasca bencana di Desa Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.
2. Mengetahui aspek apa saja yang terdapat hambatan dalam proses implementasi kebijakan pasca bencana banjir di Desa Dayeuhkolot Kabupaten Bandung

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan diharapkan memberikan manfaat :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah disiplin Ilmu Administrasi Publik, khususnya menyangkut proses implementasi kebijakan
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran yang bermanfaat bagi proses Implementasi Kebijakan dalam Pasca Bencana Banjir di Desa Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.